

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR SINGKATAN.....	x
INTISARI.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Pertanyaan Penelitian.....	2
1.3. Tinjauan Pustaka.....	3
1.4. Kerangka Teori	7
1.4.1. Analisis terhadap Kelompok Swasta (Private Group).....	11
1.4.2. Analisis terhadap DPR RI.....	12
1.4.3. Analisis terhadap Pemerintah Indonesia.....	13
1.4.4. Analisis terhadap Kelompok Kepentingan (Interest Group).....	14
1.5. Hipotesis.....	16
1.6. Metode Penelitian.....	17
1.7. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II.....	19
GAMBARAN UMUM AATHP DAN KEBIJAKAN PENOLAKAN RATIFIKASI	
AATHP INDONESIA.....	19
2.1. Gambaran Umum AATHP.....	19
2.1.1. Sejarah Kemunculan AATHP.....	19
2.2. Permasalahan Kebakaran Hutan-Lahan dan Polusi Asap.....	22
2.2.1. Pembukaan Lahan Perkebunan di Indonesia.....	23

2.2.2.	Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia.....	25
2.2.3.	Penyebaran Polusi Asap di Kawasan Asia Tenggara.....	28
2.3.	Aturan-aturan di dalam AATHP.....	31
2.3.1.	Kewajiban-kewajiban Negara-negara di dalam AATHP.....	31
2.3.2.	Kerjasama di dalam AATHP.....	32
2.3.3.	Keterikatan Negara-negara Anggota ASEAN di dalam AATHP.....	33
2.3.4.	Keterikatan Indonesia di dalam AATHP.....	34
2.4.	Kebijakan Penolakan Ratifikasi AATHP Indonesia.....	35
2.4.1.	Pengaruh Politik Domestik Indonesia.....	36
2.4.1.1.	Pengaruh Kuat dari DPR RI.....	38
2.4.1.2.	Keterlibatan Perusahaan Perkebunan.....	39
2.4.1.3.	Ketidakberhasilan Pemerintah Indonesia.....	42
2.4.1.4.	Politik dari Kelompok LSM di Bidang Lingkungan.....	44
BAB III.		46
KEBIJAKAN RATIFIKASI AATHP INDONESIA DAN PERKEMBANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERSEBUT.....		46
3.1.	Pengajuan RUU Ratifikasi AATHP Kepada DPR RI.....	46
3.1.1.	Pembahasan RUU Ratifikasi AATHP.....	47
3.1.2.	Keputusan DPR RI terhadap AATHP.....	50
3.2.	Penyerahan Instrumen Ratifikasi AATHP dari Indonesia ke ASEAN.....	51
3.3.	Kebijakan Ratifikasi AATHP dan Tanggung Jawab Indonesia.....	55
3.4.	Manfaat Pengesahan Persetujuan AATHP bagi Indonesia.....	58
3.5.	Implikasi Kebijakan Ratifikasi AATHP Indonesia.....	61
3.6.	Perkembangan Implementasi Kebijakan Ratifikasi AATHP.....	64
BAB IV.		74
PERUBAHAN POLITIK DOMESTIK DAN KEMUNCULAN KEBIJAKAN RATIFIKASI AATHP INDONESIA.....		74
4.1.	Perkembangan Politik Deforestasi Indonesia.....	74
4.2.	Perubahan Prilaku Aktor-aktor di dalam Politik Domestik Indonesia.....	77
4.2.1.	Perubahan Prilaku Kelompok Swasta terhadap AATHP 82	
4.2.1.1.	Eksplorasi Kelompok Swasta dalam Pengembangan Bisnis...85	
4.2.1.2.	Perubahan Prilaku Kelompok Swasta terhadap Lingkungan....89	

4.2.1.2.1.	Komitmen Nol Deforestasi Kelompok Swasta.....	89
4.2.1.2.2.	Kepentingan Komitmen Nol Deforestasi Kelompok Swasta...	93
4.2.2.	Perubahan Prilaku DPR RI.....	96
4.2.2.1.	Penolakan DPR RI terhadap RUU Ratifikasi AATHP.....	99
4.2.2.2.	Persetujuan DPR RI terhadap RUU Ratifikasi AATHP.....	102
4.2.3.	Pengaruh Pemerintah Indonesia terhadap AATHP.....	104
4.2.3.1.	Inisiasi Pemerintah Indonesia dalam Pembentukan AATHP..	107
4.2.3.2.	Pengajuan RUU Ratifikasi AATHP Kepada DPR RI.....	110
4.2.4.	Pengaruh Kelompok Kepentingan di Bidang Lingkungan.....	112
4.3.	Perubahan Politik Domestik dan Kebijakan Ratifikasi AATHP.....	115
BAB V.....		121
KESIMPULAN.....		121
DAFTAR PUSTAKA.....		127